

**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG  
DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PEREMPUAN**

(Skripsi)

Oleh

NURKHOLIS AJI



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2017**

## **ABSTRACT**

### **STRATEGY MANAGEMENT OF PARTAI KEADILAN SEJAHTERA BOARDS OF LAMPUNG REGION IN THE CAPACITY BUILDING OF WOMEN CADRES**

**By**

**Nurkholis Aji**

The gender gap in public life and politics is one of the global challenges faced by the world community this day. The need for women leaders in this region is becoming a homework that need to be solved as soon as possible. Political parties ultimately plays a considerable role on the above issues, thus, the selection and regeneration patterns by the political parties are expected to raise the figures of women leaders. The purpose of this research is to determine the strategy of Partai Keadilan Sejahtera in the capacity building of women cadres. This research uses qualitative approach of descriptive type with data collection techniques gathered through interviews, documentation and observation.

From this research, it is known that Partai Keadilan Sejahtera has already had its strategies and policies in developing the capacity of its female members, although in practice, the researcher encountered several shortcomings, such as: the weak tendency of women cadres in the political sphere, the uncompleted implementation of the work programs, the lack of budget management as well as lack of society support in the party. It is suggested that the government should strengthen an understanding to the women cadres of the important of women involvement in the party and also to strengthen the good relations between the cadres with the community to realize the work program in accordance with the party's mandate.

**Keywords:** Strategy, Political Party, Capacity Building.

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PEREMPUAN**

**Oleh**

**Nurkholis Aji**

Kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik adalah salah satu tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia sampai saat ini. Kebutuhan akan sosok pemimpin perempuan di daerah kini menjadi pekerjaan yang sesegera mungkin harus dipecahkan. Partai politik pada akhirnya memegang peran yang cukup besar atas permasalahan tersebut diatas, seleksi dan pola kaderisasi yang baik oleh partai politik di harapkan mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin perempuan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kapasitas kader perempuan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera sudah mempunyai strategi serta kebijakan dalam pengembangan kapasitas kader perempuan meskipun dalam pelaksanaannya peneliti melihat masih banyak kekurangan, seperti lemahnya kader perempuan dalam kecenderungan politik, Belum terlaksananya program kerja secara maksimal, kurang maksimalnya pengelolaan anggaran serta kurangnya peran masyarakat dalam partai. Saran yang diberikan adalah perlu diperkuatnya pemahaman kepada para kader perempuan tentang keterlibatan perempuan dalam partai dan mempererat hubungan baik antara kader dengan masyarakat guna merealisasikan program kerja sesuai amanah partai.

Kata kunci : Strategi, Partai Politik, Pengembangan kapasitas.

**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER  
PEREMPUAN**

Oleh

**Nurkholis Aji**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2017**

Judul Skripsi

**: STRATEGI PARTAI Keadilan  
SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG  
DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS  
KADER PEREMPUAN**

Nama Mahasiswa

**: Nurkholis Aji**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1116041072**

Jurusan

**: Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas


**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

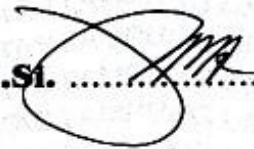
  
**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19750720 200312 1 002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.** .....



Penguji

Bukan Pembimbing : **Nana Mulyana, S.Ip., M.Si.** .....

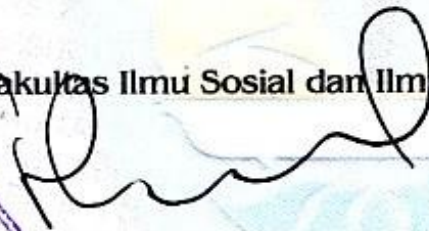


### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya, M.Si.**

**NIP. 19590803 198603 1 003**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Maret 2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana / Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dala pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

**Bandar Lampung, 08 Maret 2017**  
**Yang membuat pernyataan,**



**Nurkholis Aji**  
**NPM. 1116041072**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama **Nurkholis Aji bin Sujito bin Kasan Misni bin Kromo Karso** dilahirkan di Lampung Utara, pada hari Jum'at 22 Agustus 1992, merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak **Sujito** dan Ibu **Siti Fatimah**. Penulis memulai menempuh pendidikan formal ketika berumur 6 tahun pada :

1. 1997-2004 : SDN 01 Sidorahayu
2. 2004-2007 : SMPN 02 Papan Asri
3. 2007-2010 : SMAN 01 Abung Semuli
4. 2011-2017 : S1 Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung



## **MOTO**

“dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa”  
(Asy-Syuara' : 87 – 90)

“Semakin kita sibuk dalam urusan agama Allah, semakin Allah akan memudahkan segala urusan kita, yang kita perlukan hanyalah.. yakin”  
(Nurkholis Aji)

“Siapa yang lebih pantas kita cintai dari Allah dan Rasulnya ? tidak ada, karena kepada Allah dan Rasulnya lah semua cinta bermuara”  
(Nurkholis Aji)

“Hidup ini ada yang ngatur, tugas kita adalah tawakal”  
(Sujito, ayahandaku)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah ku ucapkan kehadiran Allah  
S.W.T  
yang menguasai hari ini, kemarin, dan hari esok.

Sholawat serta salam terindah senantiasa kucurahkan  
pada sosok pembawa rahmat dan hidayah Nabi besar  
Muhammad SAW.

Kupersembahkan Karya Kecilku ini untuk  
bapak dan ibu tercinta  
(Bapak. Sujito dan Ibu Siti Fatimah)

Dan untuk  
Almamater Tercinta

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KADER PEREMPUAN**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis dengan segenap ketulusan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku orang tua di kampus yang selama ini senantiasa memberikan dukungan dan saran untuk penulis sepanjang perjalanan menyelesaikan studi S1 Adm. Negara pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung.

4. Bapak Simon Sumanjoyo, S.AN, M.PA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP. M.si selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran demi selesainya penelitian ini.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik yang selama ini peneliti anggap sebagai orang tua kedua yang peran dan tanggung jawabnya atas peneliti sangat berharga.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
9. Bapak tercinta bapak **Sujito** dan Ibu tercinta ibu **Siti Fatimah** terima kasih atas apa yang telah dan akan kalian berikan pada anakmu, semoga pada suatu hari nanti ananda dapat memberikan kebanggaan sesuai apa yg bapak dan ibu harapkan, i love you.
10. Untuk kedelapan saudara/i kandungku Mas Hamid, Mbak Yatik, Mas Redi, Mbak Tanti, Mas Yanto, Mas Samsul, Dek Agung dan Dek Sari.
11. Teman-temanku ANTIMAPIA (ilmu administrasi negara angkatan 2011), terimakasih atas kebersamaannya.
12. Untuk HIMAGARA, HIDUP HIMAGARA! KALIAN LUAR BIASA.
13. Keluarga BEM U KBM UNILA Kabinet Mengabdikan dan Berkarya, hebat!.

14. MPM / DPM U KBM UNILA mantap.

17. Keluarga besar para Aktivis Dakwah Kampus UNILA, Allahuakbar.

18. Komunitas ONEDAYONEJUZ, terimakasih telah bersama saling mengingatkan akan pentingnya baca Al-Quran setiap hari, jazakallah khair.

19. Ikhwah para marbot masjid Al-Ukhuwah, terimakasih atas kebersamaan ibadahnya.

20. Untuk Ust. Mufti salim (ketua DPW PKS Lampung), Ibu Trisakti (ketua BPKK DPW PKS Lampung), mbak Lia Satria (ketua PKKP DPW PKS Lampung) terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancarai demi kepentingan penelitian ini.

20. Untuk Murobbi dan Ikhwah satu lingkaran, ana uhibbukum fillah.

21. Terakhir, untuk calon istriku, terimakasih telah menjadi penyemangat untukku agar segera menyelesaikan studi, karena engkau (tidak tahu siapa) telah menungguku.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 08 Maret 2017

Penulis,

**Nurkholis Aji**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Strategi .....	7
1. Pengertian Manajemen Strategi .....	7
2. Manfaat Manajemen Strategi .....	8
3. Proses Manajemen Strategi .....	9
B. Konsep Strategi .....	10
1. Pengertian Strategi .....	10
2. Peran Strategi .....	11
3. Tipe Strategi .....	12
4. Analisis Strategi Menggunakan SWOT .....	13
C. Konsep Partai Politik .....	15
1. Pengertian Politik .....	15
2. Pengertian Partai Politik .....	16
3. Peraturan-peraturan Tentang Partai Politik .....	17
4. Tujuan Pembentukan Partai Politik .....	17
5. Peran Partai Politik .....	18
6. Partai Politik di Indonesia .....	19
D. Konsep Tinjauan Kapasitas .....	20
1. Pengertian Kapasitas .....	20
2. Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas .....	21
E. Konsep Perempuan .....	22
1. Tinjauan Pustaka Tentang Perempuan .....	22

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan .....	26
B. Fokus Penelitian .....	27
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
D. Instrumen Penelitian.....	28
E. Informan Penelitian .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data .....	30
G. Teknik Analisis Data .....	31
H. Teknik Keabsahan Data .....	33

### **IV. GAMBARAN UMUM**

A. Profil dan Sejarah Partai Keadilan Sejahtera .....	36
B. Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera .....	55

### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan .....	58
B. Hasil Penelitian.....	59
1. Kelembagaan.....	61
2. Anggaran .....	63
3. Sarana dan Prasarana .....	64
C. Kebijakan PKS Lampung dalam Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan .....	65
1. Perumusan Strategi .....	67
2. Pelaksanaan Strategi .....	71
3. Evaluasi .....	75
C. Analisis Strategi .....	75
1. Identifikasi Faktor Internal .....	76
2. Identifikasi Faktor Eksternal .....	78
3. Analisis Alternatif Strategi .....	79

### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Peserta Pemilu Tahun 2014 .....	3
2. Informan Penelitian .....	28
3. Struktur Dewan Pengurus Tingkat Pusat PKS .....	55
4. Struktur Dewan Pengurus Wilayah PKS Lampung .....	56
5. Struktur Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Lampung .....	57
6. Identitas Informan .....	59
7. Faktor Internal .....	77
8. Faktor Eksternal .....	78
9. Matrik SWOT Strategi Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan PKS Lampung .....	80



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat .....	53
2. Irisan tiga bidang platform kebijakan pembangunan PKSejahtera .....	54

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik adalah salah satu tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia sampai saat ini. Adanya konvensi dan komitmen internasional terkait kesamaan gender ataupun emansipasi wanita ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap peranan perempuan dalam pemerintahan yang hanya 18,4% (UNIFEM, 2009). Keberadaan perempuan sebagai bagian dari kabinet di dunia ini jumlahnya hanya mencapai 7 dan 8% (Paxton *et.al.*, 2007).

Perempuan Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan, data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia mencapai 118.048.783 orang, dari 237.556.363 orang penduduk Indonesia. Jumlah ini merupakan jumlah yang potensial untuk pembangunan nasional, dan menunjukkan bahwa perempuan pantas dijadikan salah satu komponen pembangun bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan bangsa sangat besar dan potensial menjadi kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan di Indonesia.

Indonesia memasuki era baru sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang era otonomi daerah disahkan. Otonomi daerah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, ekonomi, bahkan politik. Sejak lama Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Sistem ini mempunyai sebuah slogan, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi keterwakilan. Salah satu contoh dari demokrasi keterwakilan adalah adanya pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu) yang mencakup seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan.

Dalam perkembangan partai politik di Indonesia, adanya *affirmative action* yang diadvokasikan kepada pemerintah pada pemilu 2004, pada akhirnya kuota 30% perempuan berhasil dimasukkan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Sejak diterapkan, jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif memberikan perbedaan yang cukup signifikan, dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 11,09% pada pemilu 2004 dan meningkat menjadi 17,86% pada pemilu 2009. Namun, penerapan kuota 30% ini dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan data dari *website* masing-masing partai politik, dimana struktur kepengurusan partai politik di tingkat pusat tahun 2005-2010 untuk 7 partai besar, yaitu Golkar, PDIP, PKB, PAN, PPP, Demokrat, dan PKS, ternyata belum ada yang mampu memenuhi ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini juga terjadi hampir di seluruh kepengurusan partai politik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota (Suacana, 2011).

Berdasarkan data dari *website* resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut

adalah hasil perolehan suara 12 partai politik peserta pemilu 2014:

**Tabel 1. Peserta Pemilu pada tahun 2014**

No	Nama Partai	Perolehan Angka	Presentase (%)
1	Partai Nasdem	8.402.812	96,72
2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04
3	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
5	Partai Golkar	18.432.312	14,75
6	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
7	Partai Demokrat	12.728.913	10,19
8	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91

Sumber : [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) (diakses pada tanggal 25 juni 2016)

Berdasarkan nama-nama partai politik diatas, terdapat satu nama partai yang menarik perhatian peneliti yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Perolehan suara 6.79% berdasarkan tabel diatas merupakan suatu prestasi dari sebuah partai politik yang baru terbentuk tahun 1998 ini, hasil tersebut tentu saja tidak terlepas dari kerja keras semua kader, karena mulainya perhelatan pemilihan umum dari tahun sebelumnya PKS mendapatkan sebuah isu korupsi yang membuat perolehan PKS diprediksikan akan turun dari pemilu sebelumnya secara signifikan. Tetapi prediksi itu pada kenyataannya tidak sepenuhnya berlaku, dengan perolehan suara di pemilu tahun 2009 sebesar 8.206.955 suara atau 7,88 %. Suara PKS di Pemilu tahun 2014 hanya turun

sekitar 1.09%, hal ini membuktikan bahwa kader PKS termasuk kader perempuan telah berjuang dengan keras dalam pemenangan pemilu 2014.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu institusi demokrasi partai politik, PKS juga ikut melaksanakan berbagai fungsi untuk memberdayakan kader perempuan. Fungsi tersebut antara lain adalah fungsi pembinaan (kaderisasi) dan fungsi rekrutmen politik. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin untuk mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih luas (Koirudin, 2004).

Pentingnya peran perempuan dalam demokrasi Indonesia saat ini memaksa PKS untuk memunculkan strategi-strategi baru untuk memaksimalkan kapasitas kader perempuan dalam tubuh partai, hal itu perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum dan atau diluar pemilihan umum. Sebagai salah satu partai politik besar, PKS memiliki peran strategis dalam melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Salah satu peran krusial partai adalah melakukan pembinaan terhadap perempuan kader partai untuk disiapkan menjadi kader perempuan yang berkualitas dan sekaligus mendongkrak keterwakilan perempuan di politik khususnya di lembaga legislatif (Al Rafni, 2016).

Menurut Subekti (2008), terdapat beberapa hal yang mewakili perlunya keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Pertama, terkait dengan hak-hak politik perempuan yang merupakan bagian integral yang tak dapat

---

<sup>1</sup> sumber: <http://www.antaraneews.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009> diakses 25 Juli 2016 Pukul: 06.30.

dipisahkan dari hak asasi manusia. Kedua, dalam sistem demokrasi, pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis. Ketiga, terkait dengan masalah kuantitas bahwa perempuan adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia (lebih dari 50%). Keempat, terkait dengan persoalan kompleks yang dihadapi Indonesia di era transisi seperti masalah ekonomi, lapangan kerja, kemiskinan, dan integrasi bangsa. Dalam konteks ini perempuan adalah bagian terbesar dari mereka yang kurang beruntung, sehingga mereka tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan.

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Strategi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung dalam Mengembangkan Kapasitas Kader Perempuan**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera wilayah Lampung dalam mengembangkan kapasitas kader perempuan ?
2. Faktor yang mempengaruhi jalannya strategi Partai Keadilan Sejahtera wilayah Lampung dalam mengembangkan kapasitas kader perempuan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi Partai Keadilan Sejahtera wilayah Lampung dalam mengembangkan kapasitas kader perempuan.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi jalannya strategi PKS Wilayah Lampung dalam mengembangkan kapasitas kader perempuan .

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi negara, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan suatu strategi organisasi politik dalam mengembangkan kapasitas dari peran kader perempuan.

#### 2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada partai politik dalam meningkatkan pengembangan kapasitas kader perempuan untuk keikutsertaan dalam pemilu mendatang ataupun diluar pemilu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Manajemen Strategi**

##### **1. Pengertian Manajemen Strategi**

Manajemen strategis pada umumnya dapat diartikan sebagai penggabungan antara pola berfikir strategis dengan fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Menurut Viljoen dalam Heene (2010:76), manajemen strategi adalah suatu proses dari pengidentifikasian, pemilihan, dan pengimplementasian aktivitas-aktivitas yang dapat memperbaiki kinerja jangka panjang dari organisasi, melalui penentuan arah disertai melanjutkan komitmen ataupun penyesuaian antara keterampilan internal dengan sarana-sarana dari organisasi berikut pula dengan lingkungan yang berubah evolutif dimana organisasi itu beroperasi.

Senada dengan itu David (2005:5), manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana tersirat dalam definisi tersebut, manajemen strategis terfokus pada upaya memadukan manajemen,



pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Istilah manajemen strategis ini sepadan dengan istilah perencanaan strategis. Istilah yang terakhir ini lebih sering digunakan di dunia akademis. Kadang-kadang istilah manajemen strategis digunakan untuk merujuk pada perumusan, pelaksanaan, evaluasi strategis. Sedangkan perencanaan strategis hanya mengacu pada perumusan strategis.

Dari pengertian manajemen strategi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis adalah cara atau upaya merumuskan strategi untuk menyesuaikan organisasi dengan lingkungan baik internal maupun eksternal, serta memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik.

## **2. Manfaat Manajemen Strategi**

Menurut Salusu (2008:495) terdapat beberapa manfaat manajemen strategis, diantaranya yaitu:

- a. Identifikasi peluang, yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi, sehingga organisasi dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan memberi petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal.
- b. Semangat korps, yakni mampu menciptakan sinergi dan semangat korps sehingga meningkatkan produktivitas.

- c. Perubahan-perubahan strategis, yakni apabila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi maka dengan manajemen strategik maka dapat menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang ingin dicapai.

### **3. Proses Manajemen Strategis**

Proses manajemen strategis menurut David (2005: 6) terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Perumusan Strategi

Mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang serta ancaman internal dan eksternal organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

- b. Pelaksanaan Strategi

Dalam konteks pelaksanaan strategi maka organisasi diharuskan untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, mengalokasikan sumber daya, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan system informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja

organisasi. Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam manajemen strategis. Melaksanakan strategi untuk melaksanakan strategi-strategi yang dirumuskan. Pelaksanaan strategi yang sering dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam manajemen strategi menuntut disiplin, komitmen dan pengorbanan pribadi. Keberhasilan pelaksanaan strategi tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi para karyawan. Hal ini lebih merupakan seni daripada ilmu. Strategi-strategi yang dirumuskan tetapi tidak dilaksanakan tidak akan memberikan manfaat.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat diubah sewaktu-waktu karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi adalah:

1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.
2. Mengukur kinerja.
3. Melakukan tindakan-tindakan korektif.

## **B. Konsep Strategi**

### **1. Pengertian Strategi**

Strategi dimiliki oleh semua organisasi baik *profit* maupun *non-profit*.

Organisasi yang memiliki strategi yang jelas akan lebih unggul kinerjanya dibandingkan dengan organisasi yang tidak terformalisasi dengan jelas strateginya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia strategi memiliki arti sebagai siasat perang atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Pearce dan Robinson (2007:20) strategi merupakan suatu rencana yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing untuk melawan siapa dan untuk tujuan apa.

Menurut David, Fred R (2005:15) strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dan merupakan tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak untuk merealisasikannya. Strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka panjang paling tidak selama 5 tahun. Oleh karena itu sifat strategi adalah berorientasi pada masa depan.

Dari beberapa definisi mengenai strategi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara atau langkah yang mendasar (fundamental) dalam menggunakan segala sumber daya suatu organisasi melalui hubungan yang efektif dan memperlihatkan kendala atau pilihan yang diarahkan dalam mencapai tujuan organisasi.

Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Keputusan-keputusan yang diambil tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi-strategi yang telah ditentukan tersebut.

## **2. Peran Strategi**

Terkait dengan kegiatan yang berorientasi pada dinamika politik maka peneliti merumuskan beberapa peran strategi yang diambil berdasarkan pengertian peran strategi secara umum diantaranya yaitu :

- a. Menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini suatu organisasi harus memiliki visi dan misi yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut.
- b. Menetapkan ukuran dan indikator yang jelas guna mencapai tujuan suatu organisasi.
- c. Menetapkan langkah-langkah strategis yang bersifat realistis dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

## **3. Tipe Strategi**

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi maka suatu organisasi menggunakan bentuk atau tipe strategi tertentu.

Menurut Koten dalam Salusu (2008:104) tipe-tipe strategi meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis

- yang baru;
- b. *Program Strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu;
  - c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
  - d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

#### **4. Analisis Strategi Menggunakan SWOT**

Strategi Politik merupakan suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun sekelompok orang dengan ide politik yang di pahamiya mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama. Ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan karena hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide pasti memiliki pendukung dan penentang.

Ide politik hanya akan dapat diwujudkan dalam satu pertarungan melawan penentang ide tersebut yang akan selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat diperoleh, tetapi yang menjadi permasalahannya tentu saja, bagaimana kekuasaan dan pengaruh itu bisa diperoleh. Dimana disaat yang sama, banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam Pemilu, dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka disilah letak substansi dari strategi politik itu. Perencanaan strategi yang baik itu berdasarkan pada analisis SWOT yang baik dalam dua bidang. Dalam bidang yang pertama yaitu perencanaan strategi membuat gambaran yang jelas mengenai arah yang hendak dituju dan apa yang menjadi tujuan, dan alasan eksistensi organisasi tersebut.

Pada bidang yang kedua perencanaan strategi berusaha memperlihatkan realitas yang ada. Dalam lingkup kerja suatu organisasi terdapat lingkup eksternal dan internal. Sedangkan lingkup internal terdiri dari atas sumber daya, kekuatan, berbagai kemungkinan serta tuntutan dari organisasi tersebut.

Perencanaan strategi harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup esksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas serta tujuan akhir mereka. Setelah memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan

alternatif guna menggapai tujuannya. Dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar organisasinya. Beberapa kombinasi yang bisa dilakukan dalam analisis SWOT perencanaan strategi yaitu :

a. Strategi kekuatan-kemungkinan

Artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan berbagai kemungkinan.

b. Strategi kekuatan-ancaman

Artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan

c. Strategi kelemahan-kemungkinan

Artinya sejauh mana kelemahan dapat diatasi untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan pengembangannya.

d. Strategi Kelemahan-kemungkinan

Artinya bagaimana kelemahan dapat diatasi, untuk mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.

## **C. Konsep Partai Politik**

### **1. Pengertian Politik**

Politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* yang berarti warganegara, *politeia* yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* yang berarti pemerintahan negara dan *politikos* yang berarti kewarganegaraan.



Interaksi warga negara terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur - unsur: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.

Menurut Ramlan Surbakti (1999:1) bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan

bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Dengan demikian jelaslah bahwa politik dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang bersangkutan dengan persoalan negara dan pemerintah.

## **2. Pengertian Partai Politik**

Partai politik merupakan suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Menurut Syabaini (2010) partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan di motivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu.

Menurut Miriam (1996) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Jadi partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi secara umum yang terorganisir dan anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

## **3. Peraturan-Peraturan Tentang Partai Politik**

Partai politik sebagai kendaraan politik memiliki peraturan yang terkait peserta pemilu. Salah satu peraturan yang mengatur terkait parpol adalah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menuliskan bahwa parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan tentang partai politik memiliki berbagai peraturan yaitu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adanya juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

#### **4. Tujuan Pembentukan Partai Politik**

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalankan ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki *platform* atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

## 5. Peran Partai Politik

Partai politik memiliki beberapa peranannya yaitu :

### a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Yaitu berfungsi sebagai komunikator politik berkaitan dengan kapasitas dan kebijakan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan kelompok masyarakat. Dalam hal ini partai politik mencari anggota yang berkomitmen dalam menjalankan kegiatan partai. Fungsi rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk mencari anggota.

### b. Sebagai Pengatur Konflik

Dalam kehidupan yang demokratis tiap negara dan tiap kelompok masyarakat berhak menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masing-masing. Akibat dari kehidupan yang demokratis tersebut dapat menimbulkan pergeseran, perbenturan, pertentangan antar kepentingan dalam masyarakat. Pengatur konflik juga

bertujuan untuk mengakumulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan melalui dialog antar kelompok untuk memusyawarahkan dan mencari keputusan politik yang mewakili kepentingan berbagai kelompok.

c. Sebagai Sosialisasi Politik

Yaitu proses pembentukan dari orientasi politik para anggota masyarakat terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Proses ini mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.

## 6. Partai Politik Di Indonesia

Lahirnya banyak partai politik dalam sistem politik di Indonesia telah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat karena hal ini erat kaitannya dengan preferensi masyarakat dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Sebenarnya, kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan merupakan suatu *signal* positif menuju ke arah pemikiran yang rasional. Kebingungan adalah cerminan adanya pergolakan intelektual masyarakat dalam menilai suatu partai, pertimbangan-pertimbangan rasional mulai dikedepankan. Terkait peserta pemilu tahun 2014 yang ikut andil di dalamnya maka diperlukan adanya kendaraan politik seperti partai politik (parpol) atau melalui jalur independen.

## D. Konsep Kapasitas

### 1. Pengertian Kapasitas

Pengembangan kapasitas (*capacity development*) adalah sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini secara luas digunakan dalam pembangunan masyarakat (*community development*). Istilah pengembangan kapasitas telah digunakan sejak tahun 1990an oleh negara-negara tertentu untuk memperbaiki kapasitas negara *partner* (negara yang mendapat bantuan). Untuk memahami konsep pengembangan kapasitas kita terlebih dahulu perlu memahami pengertian kapasitas.

Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Menurut Eade (dalam Keban 2010 : 17) *Capacity building* merupakan suatu pendekatan utama untuk pembangunan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan.

Dari pengertian ini kita dapat memberi penekanan pada dua hal penting:

a. Pengembangan kapasitas sebagian besar berupa proses

pertumbuhan dan pengembangan internal.

- b. Upaya-upaya pengembangan kapasitas haruslah berorientasi pada hasil.

Jika kita dalam semua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (*endogenous process*). Kita sebagai pihak luar tidak dapat mengembangkan orang-orang, organisasi, atau masyarakat, namun orang-orang, organisasi atau masyarakat itu sendirilah yang dapat mengembangkan diri mereka. Kita hanya dapat mendukung mereka dengan cara memfasilitasi proses untuk mempercepat perkembangan mereka, serta membantu mereka menemukan akses terhadap sumberdaya dan input yang mereka butuhkan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa secara singkat pengembangan kapasitas dapat diartikan sebagai suatu proses dimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan mengeluarkan, memperkuat, menciptakan, mengadaptasikan dan memelihara kemampuan mereka seiring dengan berjalannya waktu.

## **2. Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas**

Pengembangan kapasitas berlangsung di dalam organisasi, di dalam masyarakat, di seluruh wilayah geografis, di dalam sektor nirlaba, serta di seluruh sektor kehidupan. Pengembangan kapasitas melibatkan perorangan dan kelompok orang, organisasi, kelompok organisasi di dalam bidang atau sektor yang sama, dan juga organisasi serta pihak-

pihak dari bidang dan sektor yang berbeda.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana melaksanakan pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat. Diharapkan dengan memfasilitasi kerjasama diantara kelompok-kelompok dan mengembangkan jejaring (*network*) dengan organisasi-organisasi lain yang terkait di dalam masyarakat (misalnya di dalam wilayah sebuah desa, kecamatan, kabupaten atau bahkan di wilayah provinsi dan nasional), pengembangan kapasitas pada tingkat masyarakat dapat berlangsung. Pemberlakuan kebijakan pengembangan kapasitas secara nasional bisa menjadi alat yang baik untuk mempercepat terjadinya pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat.

Dalam suatu pendekatan yang holistik, kita hendaknya ingat bahwa pengembangan kapasitas harus menyentuh tingkat masyarakat, namun dalam prakteknya kita tidak harus memfasilitasi pengembangan masyarakat pada semua tingkatan sekaligus pada waktu yang sama. Terjadinya pengembangan kapasitas pada tingkatan-tingkatan tersebut tergantung pada tujuan program pembangunan masyarakat yang dilaksanakan. Pengembangan kapasitas bukanlah sesuatu yang instant. Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang berlangsung dalam waktu panjang dan bisa dilakukan secara bertahap.



## **E. Konsep Perempuan**

### **1. Tinjauan Pustaka Tentang Perempuan**

Dikemukakan oleh Sulaeman dan Homzah (2010) dalam sudut pandang biologis, perempuan seringkali diidentikan dengan bejana yang mudah pecah seperti, halus, lemah dan tidak berdaya. Secara kultural berdasarkan Nugroho (2010) perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan dalam tinjauan etimologis berdasarkan Sudarwati dan Jupriono (2012) kata perempuan bernilai cukup tinggi, tidak dibawah tetapi sejajar, bahkan lebih tinggi daripada kata lelaki. Hal ini bisa dilihat dari uraian singkat di bawah ini:

1. Secara etimologis, kata perempuan berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa, atau pun kepala, hulu, atau yang paling besar.
2. Kata perempuan juga berhubungan dengan kata ampu sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali; kata mengampu artinya menahan agar tidak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh; kata mengampukan berarti memerintah (negeri); ada lagi pengampu yakni penahan, penyangga, penyelamat.
3. Kata perempuan juga berakar erat dari kata empuan; kata ini mengalami pemendekan menjadi puan yang artinya sapaan hormat pada perempuan, sebagai pasangan kata tuan yang merupakan sapaan pada lelaki.

Dari pemaparan teori-teori di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kata perempuan dapat diartikan sebagai sosok yang tangguh,

mandiri, aktif, berperan dan berdaya, sehingga peneliti menilai kata perempuan pantas disandingkan dengan kata pembangunan yang juga perlu peran aktif dari seluruh masyarakat. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi perempuan adalah suatu bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun materiil guna tercapainya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai.

Tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia R.A. Kartini dalam buku yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang” secara umum menghendaki peningkatan harkat dan martabat perempuan dengan menuntut hak-hak perempuan yang memang menjadi haknya. Sebenarnya perempuan bisa berbuat apa saja seperti apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi harus disesuaikan dengan kodrat, harkat dan martabat perempuan itu sendiri.

Fenomena semacam itu perlu mendapat perhatian. Secara politik, persoalan semacam itu dapat diselesaikan dengan mempromosikan kebijakan-kebijakan sosial ekonomi yang sadar gender. Kebijakan yang secara afirmatif dan tegas memihak kepada kepentingan kaum perempuan. Selama ini kebijakan semacam itu tidak banyak diacu dalam suasana politik yang didominasi oleh semangat dan nilai maskulin.

Dengan adanya peran perempuan dalam perumusan kebijaksanaan diharapkan segala aspirasi perempuan dapat terakomodasi. Karena selama ini masih banyak produk hukum yang isinya masih bersifat diskriminatif

dan belum mampu mengakomodasi seluruh aspirasi kaum perempuan. Masih banyak masalah-masalah perempuan yang belum dapat diselesaikan seperti maraknya perdagangan perempuan, kekerasan domestik, kesehatan dan pendidikan yang rendah, kemiskinan perempuan.

Keberhasilan kuota merupakan bentuk konkrit dari kebijaksanaan afirmatif (*affirmative action*) yang dibutuhkan dalam masyarakat yang memiliki kemajuan yang sangat timpang antara laki-laki dan perempuan. Justifikasi dari tindakan pemerintah ini adalah:

1. Implementasi dari konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*the Convention on the elimination of all forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi Indonesia;
2. Dalam konferensi perempuan di Beijing 1995, Indonesia juga telah menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah yang jika kita perhatikan, hakikat dari kuota adalah pembatasan, penempatan jumlah. Secara etimologis, kuota bertentangan dengan hakikat kebebasan yang selama ini diperjuangkan oleh para aktivis perempuan. Di samping adanya pembatasan, dalam memenuhi kuota pun, perempuan akan menghadapi tantangan dari pihak laki-laki yang merasa terancam dengan adanya kuota. Selain itu, karena kuota lebih berorientasi kepada kuantitas, berarti dapat membuka peluang bagi perempuan untuk memasuki arena politik tanpa harus mempertimbangkan kualitas dirinya.

Dengan semakin banyaknya perempuan yang menempuh pendidikan tinggi, membuat mereka dapat memasuki semua profesi yang selama ini hanya digeluti oleh laki-laki termasuk menjadi pemimpin dalam setiap lembaga. Kurangnya peran perempuan dalam perumusan kebijakan di tingkat pimpinan ternyata memang sebanding dengan kurang terakomodasinya aspirasi mereka, sehingga banyak sektor kehidupan yang melibatkan perempuan di dalamnya terabaikan.

Memang selama ini perempuan hampir selalu identik dengan kehidupan keluarga (*domestic*) sedangkan laki-laki hampir selalu pula identik dengan kehidupan umum (publik). Pembagian peran itu sangat besar pengaruhnya terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan khususnya keputusan-keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat yang kehidupan publiknya telah dipisahkan dari kehidupan domestik serta menempatkan laki-laki dalam puncak hirarki, tujuan politik, yakni berusaha mempengaruhi laki-laki yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Masyarakat tradisional melekatkan partisipasi pada kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan. Tidak jarang kaum perempuan menempatkan diri sendiri sebagai sekadar penarik atau pelengkap dari kegiatan-kegiatan politik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kapasitas kader perempuan. Oleh karena itu tipe penelitian yang dipakai menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2001: 63), metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian yang bersifat kualitatif karena fokus penelitian memegang peranan yang penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya suatu penelitian. Penelitian ini akan menganalisis strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kapasitas kader perempuan, yaitu:

1. Strategi partai politik

Strategi Politik merupakan suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama. Banyak faktor yang mempengaruhi proses strategi partai politik ini, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada, mesin-mesin politik yang ada (oganisasi sosial politik atau kelompok kepentingan baik partai politik, organisasi kepemudaan, dan media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan. Dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan kapasitas kader perempuan.

2. Pengembangan kapasitas kader perempuan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini yaitu mengembangkan kemampuan kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera. Dengan sumber daya manusia yang berkapasitas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam bermasyarakat, dalam hal ini di bidang politik. Pengembangan kapasitas perempuan dalam partai politik yaitu dengan melihat sumber daya manusia dalam hal ini perempuan dan peran perempuan itu sendiri.

### C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data awal dan observasi mengenai lokasi penelitian yang dipusatkan pada Parpol PKS Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2016. Selanjutnya, berdasarkan data awal dan observasi tersebut dilakukan penyelesaian pembuatan proposal penelitian, termasuk mengumpulkan informasi dan teori yang mendukung proses penelitian. Proses ini berlangsung pada bulan Juli 2016. Pengambilan dan pengumpulan data formal dilakukan pada bulan Agustus 2016, diteruskan dengan pengolahan dan analisis data sampai tuntasnya penelitian ini.

### D. Instrumen Penelitian

Menurut sukardi (2007) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menggali data di lapangan. Fungsi dari instrumen penelitian adalah untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan ketika menginjak fase pengumpulan data di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan berperan sebagai instrumen kunci. Keuntungan peneliti sebagai instrumen kunci adalah karena sifatnya yang *responsive* dan *adaptable*. Peneliti sebagai instrumen akan dapat menekankan pada keholistikan (*holistic emphasis*), mengembangkan dasar pengetahuan (*knowledge based expansion*), kesegeraan memproses (*processual immediacy*), dan kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas data yang ditemukan (*opportunity for clarification and summarization*), serta dapat menyelidiki respon yang istimewa atau khas.

Untuk memudahkan perannya sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti akan menggunakan instrumen tambahan lain berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi serta alat-alat penunjang lainnya seperti camera digital, *tipe recorder* dan lain-lain.

#### E. Informan Penelitian

Menuru Lofland dalam Moleong (2007:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terkait dengan penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak sebagai berikut :

**Tabel. 2 Informan Penelitian**

No	Informan	Informasi
1	Ketua DPW PKS Provinsi Lampung	Status, peran dan kedudukan perempuan dalam tubuh partai
2	Ketua BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) PKS Wilayah Lampung	Status, peran dan kedudukan perempuan dalam tubuh partai dan strategi BPKK PKS Wilayah Lampung yang dituangkan dalam kebijakan organisasi
4	Ketua Deputi (PKKP) Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Strategi BPKK PKS Wilayah Lampung yang dituangkan dalam kebijakan organisasi

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2007: 186) dalam pengumpulan data pada sebuah penelitian terdapat sedikitnya 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

##### 1. Wawancara



Yaitu tehnik mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada *responden* atau kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Secara garis besar pedoman wawancara dalam penelitian ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengetahui bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kapasitas kader perempuannya serta apasaja yang kemudian dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat jalannya strategi tersebut. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara dilakukan.

## 2. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dalam sebuah penelitian terdapat sumber lain yang dapat digunakan oleh peneliti adapun sumber tersebut diantaranya yaitu dokumen-dokumen, foto dan bahan statistik lainnya. Dokumen yang akan menjadi orientasi dalam penelitian ini terdiri dari visi misi PKS, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, dan surat-surat resmi lainnya.

## 3. Observasi

Sedangkan pedoman observasi merupakan alat untuk memudahkan peneliti dalam mengamati data secara lengkap pada waktu berlangsungnya proses penelitian. Pedoman observasi peneliti gunakan untuk mengetahui sejauhmana pencapaian strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kapaitas kader perempuan serta apasaja yang menjadi indikator pencapaian keberhasilan strategi tersebut.

## **G. Teknik Analisis Data**

Data-data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran (deskripsi) tentang suatu fenomena yang terjadi. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai beberapa hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Nazir (2003:358) mengatakan bahwa analisis data adalah sebagai kegiatan mengelompokkan, membuat suatu ukuran, memanipulasi serta mengangkat data sehingga mudah untuk dibaca.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam akan diolah dan dianalisa secara kualitatif dengan proses reduksi dan interpretasi. Data yang dikumpul kemudian akan ditulis dalam bentuk transkripsi yang kemudian dilakukan pengelompokan atau pengkategorian dengan melakukan reduksi data yang tidak terkait dan kemudian diinterpretasikan mengarah pada fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2010:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010: 247-253) pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penelitian memilih dan menyeleksi yang diperoleh dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kapasitas kader perempuan (studi pada kepengurusan PKS provinsi Lampung Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga).

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa melalui penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahannya diarahkan dari arti data tersebut. Peneliti juga masih mengalami kelebihan data, sehingga juga terjadi pembuangan data yang tidak perlu, sehingga nantinya dapat ditemukan data yang benar-benar sesuai untuk menjawab fokus penelitian. Oleh karena itu, selama penelitian peneliti melakukan reduksi data secara terus menerus.

### 2. *Data Display* (penyajian Data)

Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasar pemahaman tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam teks narasi, grafik, *matrik*,

*network* (jejaring kerja) dan *chart*. Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang lebih utama dalam analisa kualitatif yang *valid*. *Display* data ini sangat membutuhkan kemampuan *interpretative* yang baik pada si peneliti, sehingga dapat menyajikan data yang lebih baik.

### 3. *Conclusion Drawing/verification* (penarikan kesimpulan)

Menarik kesimpulan hanyalah sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empiris hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam bab tinjauan pustaka, atau teori-teori lain yang juga relevan dengan permasalahan penelitian yang akan ditemukan. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dan makna-makna yang muncul dari data di ujung kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

## **H. Teknik Keabsahan Data**

Menurut Emzir (2011:78), teknik keabsahan data adalah merujuk pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan proyek penelitian. Kualitas data dan ketepatan metode yang

digunakan untuk melaksanakan penelitian sangat penting khususnya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial karena pendekatan filosofis dan metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Emzir (2011:79), ada empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu:

#### 1. Kredibilitas

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member checking*.

Menurut Emzir (2011:82), ada tiga bentuk yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

##### a. *Triangulation*

*Triangulation* adalah proses penguatan bukti-bukti dari individu individu yang berbeda, jenis data dalam deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. Peneliti menguji setiap sumber informasi dan bukti-bukti temuan untuk mendukung sebuah tema. Hal ini menjadi jaminan bahwa studi akan menjadi akurat karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau proses. Dalam cara ini,

peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan yang akurat dan kredibel.

b. *Member Checking*

*Member Checking* adalah suatu proses di mana peneliti bertanya kepada seseorang atau lebih partisipan dalam studi untuk mengecek keakuratan dan keterangan tersebut. Pengecekan ini melibatkan pengambilan temuan kembali kepada partisipan dan menanyakan kepada mereka (secara tertulis atau lisan) tentang akurasi dari laporan tersebut.

c. *Auditing*

*Auditing* adalah di mana peneliti hadir atau absen pelayanan dari seorang individu dari luar studi untuk *me-review* berbagai aspek penelitian. Proses *auditing* akan *me-review* proyek dan menulis atau mengomunikasikan suatu evaluasi tentang studi. Audit ini mungkin muncul selama dan pada kesimpulan dari sebuah studi.

2. Transferabilitas (*Transferrability*)

Kriteria tranferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, tranferabilitas adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan tranferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

### 3. Dependabilitas

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

### 4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Kriteria konfirmabilitas atau objektivitas menurut Emzir (2011:81), adalah merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Setelah melakukan penelitian, seseorang dapat melakukan audit data yang menguji pengumpulan data dan prosedur analisis dan membuat penilaian tentang kemungkinan distorsi dan bias.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

### **A. Profil dan Sejarah Partai Keadilan Sejahtera**

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman



dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan strateginya Partai Keadilan Sejahtera memiliki Visi dan Misi organisasi, adapun visi misi Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut :

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah:

***Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat***

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan *Ukhuwwah Islamiyyah* (ikatan keislaman), *Ukhuwwah Wathaniyyah* (ikatan kebangsaan) dan *Ukhuwwah Basyariyyah* (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera. Masyarakat Madani sebagai warisan *Sunnah Nabawiyah* adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam dari kalangan muslim atau non-muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat *modern* dan menghadirkan fakta historis tentang pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati pluralitas dan merealisasikan *Ukhuwwah Islamiyyah*, *Ukhuwwah Wathaniyyah* dan *Ukhuwwah Basyariyyah* sekaligus.

Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Makkah. Nilai-nilai itu bisa disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya; ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang aman dan damai; mengokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturahmi; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt. Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil menggelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya hadir gelombang reformasi (1998).

Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif dengan beragam realita yang sudah ada di nusantara, baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya, dengan semangat agama dakwahnya yang *rahmatan lil alamiin*, jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di seluruh nusantara bahkan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya beragam kerajaan- kerajaan Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang

tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun.

Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para wali songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari *syumuliyatul islam* dan risalahnya yang *rahmatan lil alamin*, karena agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.

Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan *syuro*, serta *amar ma'ruf nahi munkar*, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga, agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas kontrol, maupun legislasi dengan membuat undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara Indonesia yang merealisasikan

ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis, agar dapat hadirnya masyarakat madani yang dicitakan itu.

Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan *absurd* bahkan *ahistoric*, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam UUD NKRI 1945. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era reformasi dan lain-lain.

Agar masyarakat madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan syariah Islam yang *rahmatan lil alamin*, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan masyarakat madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotongroyong dan

bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk ber-silaturrehim dan ber-ta'awun untuk mewujudkan *Ukhuwwah Islamiyyah*, *Ukhuwwah Wathaniyyah* dan *Ukhuwwah Basyariyyah*, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks ke-Indonesiaan kontemporer dengan segala peluang dan tantangannya, karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan alternatif solusi yang lebih baik dan sikap adil dan bijaksana terhadap non-muslim maupun yang berbeda latar organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadirlah hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era reformasi.

PK Sejahtera sebagai partai dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan

kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.

**Adil** adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*ifrath* dan *tafrith*).

Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Keadilan adalah nilai yang bersifat intrinsik, baik dalam struktur ataupun perilaku manusia. Tuhan Yang Mahakuasa menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang. Sementara itu, Islam ditegaskan sebagai agama fitrah kemanusiaan. Situasi-situasi psikis dan sosiologis manusia, sesuai dengan fitrahnya, memerlukan nilai-nilai keadilan. Sebab, dengan tegaknya keadilan di tengah-tengah situasi kemanusiaannya, setiap individu dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Selain itu, keadilan menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang mereka anut.

Wujud konkret nilai-nilai keadilan pada dalam aspek kemanusiaan adalah sikap "pertengahan" yang telah menjadi salah satu kekhususan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem. Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan

seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Itulah pangkal kesejahteraan dalam maknanya yang sejati. Kesejahteraan paripurna akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Itu sebabnya keseimbangan yang sempurna di antara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan, sesuai dengan makna asasi keadilan ('adalah) yang berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (*i'tidal*). Oleh sebab itu, para ulama menegaskan nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna.

Posisi keadilan dalam kehidupan manusia dan alam semesta amat fundamental. Sebuah hadits Nabi Saw menyebutkan: "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu kelak di sisi Allah Swt berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaitu, mereka yang bertindak adil dalam pemerintahan, terhadap keluarga, dan terhadap bawahan mereka." Konsekuensinya, setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Kezaliman itu kegelapan, sedangkan keadilan itu cahaya. Maka, kewajiban menegakkan keadilan dan menumbangkan segala bentuk kezaliman, penindasan, sikap berlebih-lebihan, merugikan orang lain, kebencian, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan harus menjadi bagian dari ideologi Islam. Semangat ini harus mewarnai setiap aksi dan menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Manusia, baik secara individual maupun kolektif, bertanggungjawab menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan.



**Sejahtera** secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Firman Allah Swt menegaskan, “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (QS, al-Nahl 16: 112).

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia.

Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran modal (kapital) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencitakan kesejahteraan untuk semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral (*moral hazard*) akibat tindak

kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) yang menjamin kesetaraan sosial (*social equity*), kelestarian lingkungan (*environmental prudence*), dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Semua itu tidak lain merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia<sup>1</sup>

Ekonomi yang maju ialah kondisi yang dibangun di atas kesadaran adanya misi peradaban untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keterpeliharaan moralitas manusia, baik secara individual maupun kolektif, keseimbangan kemajuan ekonomi, kemandirian, kesatuan ekonomi nasional, dan kelestarian alam semesta menjadi patokan utama pembangunan bangsa. Oleh karena itu, di tengah dinamika meraih kemajuan ekonomi, maka penyimpangan etika, perilaku eksploitatif, konsumtivisme, dan hedonistik-materialistik harus dapat diminimalisasi. Karena, pembangunan ditujukan bukan untuk kemajuan materi saja, melainkan juga demi tetap terpeliharanya sifat asasi dan martabat seluruh manusia. Pada titik itu, kemajuan ekonomi harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa, bahkan umat manusia, secara adil.

Atas dasar itu perlu ditegakkan prinsip penyatuan moralitas dan etik dalam seluruh aktivitas ekonomi guna meminimalisasi, bahkan menghilangkan, berbagai bentuk kezaliman. Memprioritaskan kepentingan umum dan

---

<sup>1</sup> *Our Common Future, World Committee for Environment and Development, United Nation, 1987.*

kemaslahatan bersama harus dilakukan di atas keuntungan pribadi dan kelompok, guna menjamin hak-hak ekonomi semua pihak dan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Pengutamakan ini harus menjadi kebijakan yang dipatuhi bersama.

**Bermartabat** menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.

Untuk itu semua warga negara dapat mengambil peran dalam membangun negara sehingga menjadi masyarakat madani berdaya dan berkeadilan, masyarakat yang tidak mudah dipatronisasi oleh kekuatan manapun. Sebab, kehidupan sosial manusia di muka bumi akan lebih tertata dengan sistem sosial yang berkeadilan walau masih disertai suatu perbuatan dosa, daripada dengan sistem tirani yang zalim. Kewajiban individu untuk menegakkan keadilan harus dipandang sebagai prosedur regulatif bagi tindakan sosial dan

etik, sehingga akhirnya menghasilkan keadilan sosial yang efek kebaikannya akan dirasakan bersama.

Substansi keadilan sosial ialah terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi pihak yang dinafikan kebutuhan dasarnya. Setiap individu mendapat hak-hak sosialnya secara penuh dan utuh, memperoleh jaminan sosial secara proporsional, serta manfaat dari sumber-sumber daya alam dan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Dalam waktu yang sama ia harus melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawab sosialnya dalam rangka merealisasikan keadilan menyeluruh dalam kehidupan. Hak-hak ini merangkumi semua hak-hak individual dan sosial manusia Indonesia yang bermartabat.

Tegaknya keadilan sosial akan mewujudkan masyarakat yang egaliter dan menghargai orang berdasarkan keutamaan dan prestasinya, bukan pada etnisitas, entitas, keturunan, dan faktor bawaan lainnya. Oleh sebab pluralitas kebudayaan merupakan realitas yang melekat dalam sebuah bangsa, masyarakat, atau komunitas, maka perlu kearifan dalam memandang dan menyikapnya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada setiap komunitas atau bangsa dengan cara menghargai kebudayaannya.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, maka secara budaya dan agama, Islam dapat tampil memberikan model masyarakat yang bisa mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan pluralitas budaya lokal dan sekaligus aspirasi kemodernan dalam sebuah rumah besar bernama Indonesia. Hal itu mensyaratkan pandangan keagamaan yang lebih menekankan aspek

substansial yang universal daripada simbolik, dan tumbuhnya sikap saling menghargai serta kearifan di kalangan masyarakat. Dalam kerangka itulah kita memandang dan menyikapi pluralitas kebudayaan hingga pada akhirnya dapat memperkaya kebudayaan nasional menjadi satu sistem yang indah, efektif, dan saling bersinergi. Pluralitas sebagai karunia Tuhan, baik itu terkait dengan ras, budaya maupun profesi, seharusnya dilihat sebagai suatu kekayaan yang patut dikelola dengan penuh keadilan bagi bangsa yang bermartabat.

Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus, kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni perlindungan atas: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Itulah masyarakat Indonesia yang religius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang dapat berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya khas takwa. Indonesia yang kita citakan adalah masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif-konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

**Misi** yang diemban Partai Keadilan Sejahtera

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan

fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya

saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources and knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.



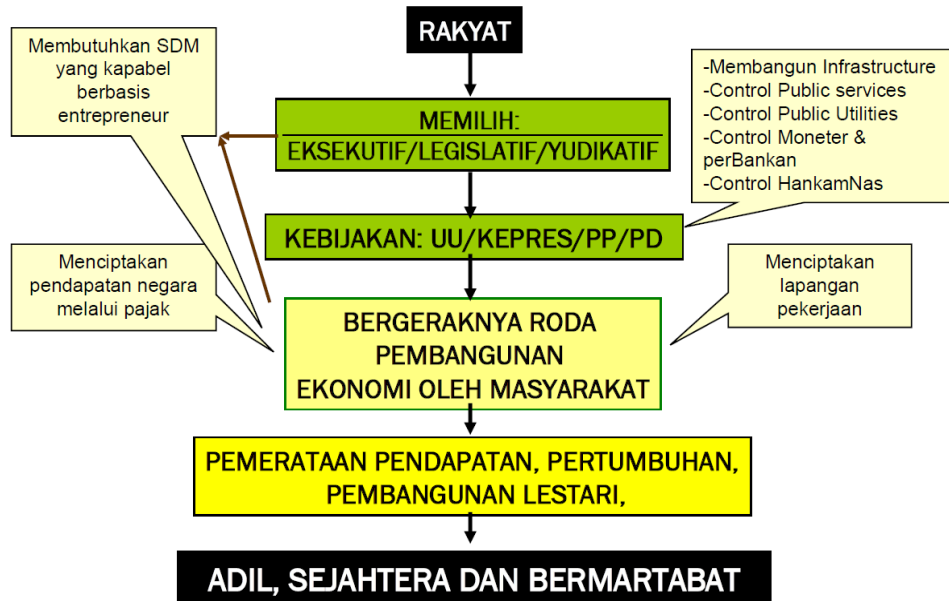
PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan. PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan. Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis kompetensi. Ketiga komponen negara ini adalah *actor* pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi.

Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis. Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif. Berbagai upaya,

program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis.

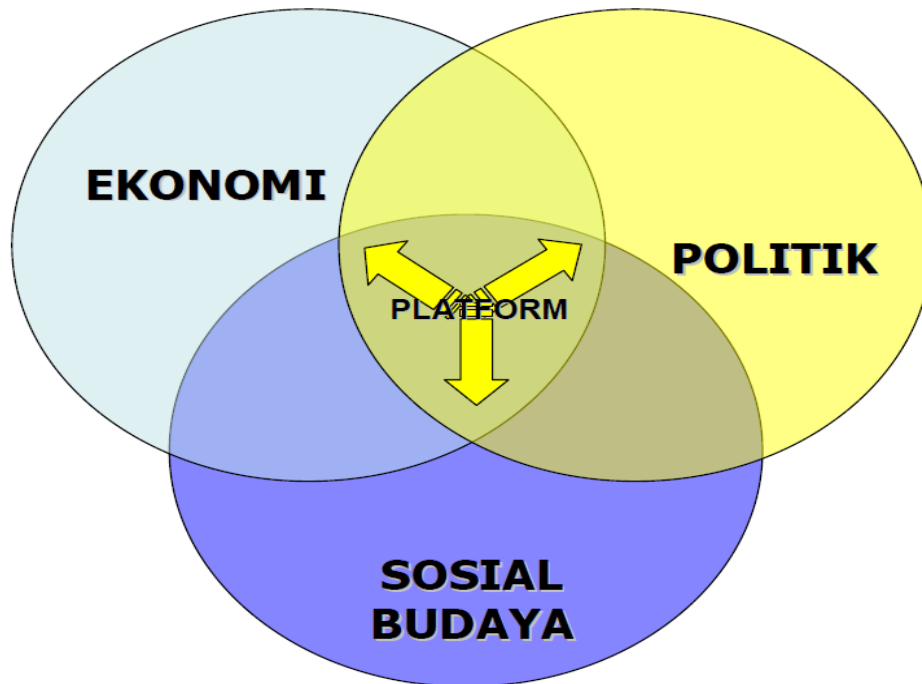
**Gambar 1. Mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat**



Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka disusunlah *platform* Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai. Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi *platform* kebijakan pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang

digulirkannya. *Platform* ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain.

**Gambar 2. Irisan tiga bidang platform kebijakan pembangunan PK Sejahtera.**



## B. Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera

**Tabel 3. Struktur Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) PKS Masa Khidmat 2015 – 2020**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Majelis Syuro	Dr Salim Segaf Al Jufri
2	Wakil Ketua Majelis Syuro	Dr Hidayat Nur Wahid
3	Sekretaris Majelis Syuro	Ir. H. Untung Wahono, M.Si
4	Ketua Majelis Pertimbangan Pusat	Suharna Surapranata, MT
5	Ketua Dewan Syariah	Dr KH Surahman Hidayat

6	Presiden	M Sohibul Iman, PhD
7	Sekretaris Jenderal	Mustafa Kamal, SS
8	Wakil Sekretaris Jenderal	KH Ir. Abdul Hakim, M.M
9	Bendahara Umum	Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
10	Wakil Bendahara Umum	Dr Abdul Kharis Al Masyhari
11	Ketua Bidang Kerjasama Internasional	Anis Matta, Lc
12	Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi	H Abdul Muiz Saadih, MA
13	Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri	Dr Taufik Ramlan Wijaya
14	Ketua Badan Perencanaan	KH Bukhori Yusuf, Lc, MA
15	Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah	H Ahmad Heryawan, Lc, M.Si
16	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara	Dr Hermanto
17	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan	Drs.H. Gufron Azis Fuadi
18	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar	Tate Qomarudin, Lc
19	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya	Ir.H Sigit Sosiantomo
20	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali Nu Sra	Sugeng Susilo
21	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan	Hb Aboe Bakar Al-Habsi, SE
22	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi	Cahyadi Takariawan
23	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Intim	Dr.H Muhammad Kasuba, MA
24	Ketua Bidang Kaderisasi	Amang Syafruddin, Lc
25	Ketua Bidang Kepemudaan	Dr Mardani Ali Sera
26	Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga	Asep Saefullah Danu
27	Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Dra Wirianingsih, Msi
28	Ketua Bidang Seni dan Budaya	Muhammad Ridwan
29	Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi	Drs H Musholli
30	Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader	Deni Tresnahadi
31	Ketua Bidang Pembangunan Umat	Hilman Rosyad, Lc
32	Ketua Bidang Polhukam	Drs H Almuzammil Yusuf, M.Si
33	Ketua Bidang Kesra	Dr Fahmy Alaydroes, MM, MED
34	Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup	Ir Memed Sosiawan, ME

35	Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan	Ledia Hanifah Amalia, Ssi, MPSiT
36	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada	Drs Khoirul Anwar, Apt
37	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat	Dedi Supriyadi, S.Ikom

**Tabel 4. Struktur Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Lampung Masa Khidmat 2015 – 2020**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Umum	H. Ahmad Mufti Salim, Lc., MA
2	Wakil Ketua Umum	Ir. H, Akhmadi Sumaryanto
3	Sekretaris Umum	H. Ade Utami Ibnu, SE
4	Bendahara Umum	H. Yusuf Efendi, SE
5	Wakil Sekretaris Umum 1	H. Munawardi, SP
6	Wakil Sekretaris Umum 2	Vittorio Dwison, S.Ip
7	Wakil Bendahara Umum 1	Yudi Handoko, S.Pd
8	Wakil Bendahara Umum 2	Oktaviantimala, S.Pd
9	Bidang Kaderisasi	H. Agus Kurniawan, S.T
10	Sekretaris	Evi Virdiana, S.Si
11	Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Proyeksi	H. Marsudianto, S.Pd, M.Si
12	Sekretaris	Agus Widodo, S.Si
13	Bidang Kepemudaan	M. Suhada, S.Si
14	Sekretaris	Suci Kurniati
15	Bidang Seni dan Budaya	Cucu Mulyono
16	Sekretaris	Denny Harnova, S.Si
17	Bidang Kepanduan dan Olahraga	Martono
18	Sekretaris	Heryani
19	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga	Tri Sakti Wijayana, S.Pd
20	Sekretaris	Yuda Roseptalia, S.Si
21	Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada	H. Antoni Imam, SE
22	Sekretaris	Aep Susanto, S.Si
23	Bidang Humas	Linda Wuni, S.Tp
24	Sekretaris	Aulia Luthfiana, S.Psi
25	Bidang Polhukam	H. Mardhani Umar, SH., MH
26	Sekretaris	Sidik Effendi, SH
27	Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup	Grafieldy Mamesah

28	Sekretaris	Tri Agustiana, SE
29	Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah	Yulianto, SE
30	Sekretaris	Citra
31	Bidang Kesejahteraan Rakyat	H. Nandang Hendrawan, SE
32	Sekretaris	Abdullah
33	Bidang Pemberdayaan Harian Usaha dan Ekonomi Kader	H. Yusnadi, S.T
34	Sekretaris	Samsuri, SE
35	Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan	Diktri Ariansyah, S.Tp
36	Sekretaris	Lia Satria, S.Si

**Tabel 5. Struktur Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Lampung Masa Khidmat 2015 – 2020**

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Bidang	Tri Sakti Wijayana, S.Pd
2	Sekretaris Bidang	Yuda Roseptalia, STP
3	KetuaDeputi Ketahanan Keluarga	Wulan Irodatiah R. S.PSi
4	Sekretaris Deputi Ketahanan Keluarga	ErinaMaysari, STP
5	Ketua Deputi Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Lia Satria, S.Si
6	Sekretaris Deputi Pengembangan Kapasitas Kader Perempuan	Riyana Astri, S.Si
7	Ketua Deputi Kajian Keluarga, Perempuan dan Anak	Dr. Kiki Retno Apriyani
8	Sekretaris Deputi Kajian Keluarga, Perempuan dan Anak	Sri Wahyuni, S.Pdi
9	Ketua Deputi Hubungan Kelembagaan Perempuan	Vera Libriyanti
10	Sekretaris Deputi Hubungan Kelembagaan Perempuan	Irma Susanti

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “**Strategi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung dalam Mengembangkan Kapasitas Kader Perempuan**” sebagai berikut:

1. Partai Keadilan Sejahtera sudah mempunyai strategi yang dituangkan melalui kegiatan dalam pengembangan kapasitas kader perempuan.
2. Dalam pelaksanaannya peneliti melihat masih banyak kekurangan dalam strategi partai politik PKS tersebut, hal ini dapat dilihat dari:
  - a. Lemahnya kader perempuan dalam kecenderungan politik
  - b. Belum terlaksananya program kerja secara maksimal
  - c. Pengelolaan anggaran yang tidak maksimal
  - d. Kurangnya peran masyarakat dalam partai

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam pengembangan kader perempuan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diperkuatnya pemahaman kepada para kader perempuan tentang bagaimana seharusnya perempuan terlibat dalam partai, sesuai amanah undang-undang, sehingga selain sebagai seorang ibu dan atau seorang istri para kader perempuan PKS juga dapat terlibat aktif dalam partai.
2. Hubungan yang baik antara kader perempuan dengan masyarakat juga menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting, dengan begitu akan lebih mudah untuk berkomunikasi dalam rangka merealisasikan program partai kepada masyarakat yang merupakan salah satu amanah partai, setidaknya ada kegiatan yang dapat mempertemukan antara kader perempuan PKS dengan kalangan perempuan masyarakat umum secara rutin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Rafni dan Suryanef. 2016. Profil, Sikap dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat. *Laporan Penelitian*. Universitas Negeri Padang.
- Czudnowski, Moshe. 1975. "Political Recruitment" dalam Fred I. Greenstein and Nelson Polsby, *Micro Political Theory. Handbook of Political Science*. Vol.2.
- David, Fred R, 2005, *Strategic Management: Concepts and Cases*, 10<sup>th</sup>ed, New Jersey: Prentice Hall
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali Pers
- Keban, Yeremia. 2010. Enam Dimensi Strategik Administrasi Negara. Gaya Media; Yogyakarta
- Koirudin.2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Meriam, Budiarjo 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Moch. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : Bandung: Rosdakarya.
- Paxton, Pamela, and Huges M. Melanie. 2007. *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. Pine Forge Press. Los Angeles.
- Pearce Dan Robinson, 2007, *Manajemen Strategi* ,Salemba Empat, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Statejik, Organisasi Publik dan Nonprofit*. Grasindo, Jakarta.

Suacana, I Wayan Gede.2001. Perumusan Hasil Assesemen Lapangan kedalam Kerangka Model Strategis Kaderisasi Perempuan Partai Politik.*Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dan Institute for Peace and Democracy (IPD)*.Jakarta.

Subekti, Valina Sangka. 2008. Kepemimpinan Politik di Indonesia. *Jurnal Politika Vol.4 No.1*. Akbar Tanjung Institut. Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sulaeman, Munandar, Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: RefikaAditama.

UNIFEM. 2009. *Who Answer to Women? Gender and Accountability*.

Yusran, Rahmadani dan Suryanef.2007. Orientasi Politik dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Kota Padang *Laporan Penelitian*. Universitas Negeri Padang.

Sumber data hukum :

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang No 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-undang No 01 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Sumber dari internet :

<http://www.antarane.ws.com/berita/140511/hasil-perolehan-suara-parpol-pemilu-2009/> diakses 25 Juli 2016 Pukul: 06.30.